

TRANSFORMASI TRADISI AKADEMIK ISLAM DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP RESOLUSI KONFLIK AGAMA DI ACEH

Mumtazul Fikri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Mumtazulfikri82@gmail.com

ABSTRACT

Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi kasus-kasus penting terkait kontestasi lintas mazhab Islam di Aceh. Kasus tersebut tidak dapat dianalisis sebagai fenomena sederhana, tetapi merupakan warisan sejarah dari konflik agama yang terjadi di Aceh sejak periode Kesultanan Aceh Darussalam hingga periode pasca tsunami dan konflik. Tulisan ini diawali dengan uraian fakta sejarah tentang khazanah keilmuan Islam di Aceh, sejarah konflik-konflik agama yang terjadi pada empat periode peradaban Islam di Aceh, dan transformasi tradisi akademik Islam serta kontribusinya terhadap resolusi konflik agama di Aceh. Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis yang menunjukkan bahwa, transformasi tradisi akademik Islam di Aceh terjadi dari sakral-literal ke profan-kontekstual. Adapun kontribusi tradisi akademik Islam terhadap resolusi konflik agama di Aceh sebagai berikut; (1) meredam pemberontakan terhadap Sultan pada periode kesultanan Aceh Darussalam;(2) mensyiarkan spirit jihad dan menjaga keteguhan iman orang Aceh pada periode penjajahan Belanda;(3) meredam potensi konflik melalui pengembangan kelembagaan dayah dan madrasah pada periode pasca kemerdekaan;(4) meredam potensi konflik melalui pengembangan kelembagaan dan media multimedia pada periode pasca tsunami-konflik.

KEYWORDS

transformasi; kontribusi; tradisi akademik; resolusi konflik

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi kasus-kasus penting terkait kontestasi lintas mazhab Islam di Aceh. *Pertama*, kasus larangan pelaksanaan Pengajian

Tauhid, Tasawuf dan Fikih (Tastafi) di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 (www.voa-islam.com, 2016). Tastafi adalah sebuah pengajian ulama dayah (pesantren) yang telah diselenggarakan di Mesjid Raya Baiturrahman sejak Jumat, 7 Maret 2014. *Kedua*, Kasus pengambilalihan manajemen pelaksanaan tata tertib Shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang dilakukan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan Front Pembela Islam (FPI) pada Jumat, 19 Juni 2015 (www.acehterkini.com, 2016). Berselang setahun kemudian, kasus serupa juga terjadi di Masjid Al-Izzah, Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 (www.ajnn.net, 2016). *Ketiga*, kasus pengepungan Ma'had As-Sunnah Lampeuneuruet kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, lembaga ini oleh warga disinyalir menjadi pusat penyebaran Wahabi di Aceh (www.muslimmedianews.com, 2016). *Keempat*, kasus demonstrasi ribuan santri bersama ulama dan pimpinan pesantren di kantor Gubernur Aceh pada hari Kamis tanggal 10 September 2015. Tema yang diusung dalam gerakan massa ini adalah penolakan terhadap berkembangnya paham Wahabi, Syiah dan Komunis di Aceh (www.aceh.antaraneews.com, 2016).

Secara dangkal keempat kasus tersebut di atas agaknya mengerucut pada titik masalah yang sama yaitu kontestasi pemahaman lintas mazhab agama di Aceh, khususnya *Aswaja* dan *Wahabi*. Kasus pertama menunjukkan adanya larangan kegiatan pengajian Tastafi di Masjid Raya Baiturrahman. Tastafi adalah salah satu wujud pendidikan progresif ulama dayah di Aceh, yang sebelumnya terkesan eksklusif dengan pengajian *balee* (balai) khas pesantren menjadi inklusif dengan pengajian masjid khas perkotaan. Kasus kedua merupakan upaya pengambilalihan manajemen Masjid Raya Baiturrahman oleh Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan Front Pembela Islam (FPI). Menariknya, gerakan ini dimotori oleh tiga organisasi Islam terbesar di Aceh, dimana dua diantaranya merupakan organisasi perkumpulan ulama pimpinan pondok pesantren. Kasus ketiga menunjukkan adanya pengepungan Ma'had As-Sunnah Lampeuneuruet kota Banda Aceh. Ma'had As-Sunnah adalah lembaga pendidikan pesantren yang menganut pemahaman mazhab Wahabi di Banda Aceh. Sedangkan kasus keempat menunjukkan adanya gerakan penolakan terhadap paham Wahabi, Syiah dan Komunisme di Aceh yang dilakukan oleh ribuan santri bersama ulama dan pimpinan pesantren di Aceh. Menilik kepada keempat kasus di atas, secara dangkal melahirkan simpulan sementara bahwa keberadaan pendidikan Islam seolah menciptakan gejolak dan konflik agama di Aceh. Dan keberagaman pemahaman lintas mazhab Islam seolah tidak mampu menciptakan kedamaian dan keharmonisan di Aceh.

Faktanya, simpulan di atas agaknya tidak sejalan dengan sejarah perkembangan tradisi akademik Islam di Aceh. *Pertama*, fakta sejarah menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Aceh sarat dengan nilai toleransi dan harmoni terhadap perbedaan dan keberagaman. Diantaranya, fakta keberadaan santri pelajar dari berbagai negeri yang menuntut ilmu kepada para ulama di Aceh (Hadi, 2014).

Berikutnya, fakta keberadaan ulama luar Aceh yang menetap dan mengajar di Aceh, diantaranya: (1) Nuruddin Ar-Raniry, penasehat Kesultanan Aceh di masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani yang berasal dari negeri Ranir-India, (2) Baba Daud Bin Ismail bin Agha Mustafa bin Agha Ali ar-Rumi atau lebih dikenal dengan *Teungku Chik Di Leupu*, seorang ulama Turki di Aceh yang masyhur dengan karyanya *Masa'il al-Muhtadi* yang sangat populer dalam masyarakat Aceh (Fikri, 2015). *Kedua*, fakta bahwa konflik agama di Aceh telah muncul sejak lama, datang silih berganti dan selalu terjadi sejak masa kesultanan Aceh dulu hingga pasca konflik GAM-RI dan musibah gempa tsunami Aceh tahun 2004 silam. Diantaranya, (1) konflik antara Fansuri dan Ar-Raniry pada masa kesultanan Aceh, (2) konflik ulama-umara Aceh dan penjajah Belanda pada masa kolonial, (3) konflik kaum sakral dan kaum profan pasca kemerdekaan, dan (4) konflik Aswaja dan Wahabi pasca konflik dan tsunami. Menariknya, dalam konflik-konflik agama yang terjadi di Aceh, pendidikan Islam mengambil peran penting di dalamnya, tidak sebagai akar pemicu konflik tetapi justru memberi kontribusi terhadap resolusi konflik-konflik agama tersebut.

Maka tulisan ini akan menjawab sebuah pertanyaan utama, bagaimana kontribusi tradisi akademik Islam terhadap resolusi konflik agama di Aceh? Berikutnya pertanyaan tersebut akan dijawab dengan melihat kepada beberapa permasalahan, yaitu; *Pertama*, bagaimana perkembangan khazanah keilmuan Islam di Aceh? *Kedua*, bagaimana sejarah konflik agama yang terjadi di Aceh? *Ketiga*, bagaimana transformasi tradisi akademik Islam di Aceh? *Keempat*, bagaimana kontribusi tradisi akademik Islam terhadap resolusi konflik agama di Aceh? keempat permasalahan tersebut akan menjadi topik pembahasan utama dalam tulisan ini. Untuk kebutuhan pembahasan, tulisan ini akan dimulai dengan menjelaskan tentang Aceh dan khazanah keilmuan Islam, Aceh dan konflik-konflik Agama, dari *sakral-literal* ke *profan-kontekstual*, dan kontribusi tradisi akademik Islam terhadap resolusi konflik agama di Aceh.

ACEH DAN KHAZANAH KEILMUAN ISLAM

Aceh, propinsi paling Barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak antara 01° 58' 37,2" - 06° 04' 33,6" Lintang Utara dan 94° 57' 57,6" - 98° 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2012 Propinsi Aceh terbagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota madya, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6. 493 gampong atau desa. Wilayah Aceh terdiri dari daratan pegunungan yang dikelilingi oleh lautan. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia (www.acehprov.go.id, 2016). Secara geografis wilayah Aceh sangatlah strategis maka tidak mengherankan dahulu daerah ini menjadi wilayah pertama masuknya Islam di nusantara. Selain itu, kemudahan akses bagi para pelaut menjadikan Aceh sebagai bandar persinggahan alternatif. Diantara kota utama yang ramai dikunjungi di Aceh adalah Bandar Aceh Darussalam (Banda Aceh saat ini), ibukota kerajaan Aceh Darussalam. Setelah jatuhnya Melaka ke tangan Portugis

para pedagang muslim lebih senang berdagang ke Bandar Aceh dibandingkan negeri Melaka yang telah ditaklukkan. Akses transportasi laut yang mudah menjadikan Bandar Aceh sebagai kota pelabuhan yang maju dan makmur, hingga kemudian menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Pada abad XVI dan XVII, Bandar Aceh Darussalam berkembang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Di zaman keemasannya, setidaknya ada 3 (tiga) lembaga pendidikan tinggi Islam di Bandar Aceh. *Pertama, Masjid Jami Baiturrahman*, yang dibangun oleh Sultan Alaidin Mahmud Syah I pada tahun 691 H / 1292 M. Masjid Jami Baiturrahman selain menjadi pusat kegiatan peribadatan, juga merupakan lembaga perguruan tinggi (universitas) terbesar di Asia Tenggara, yang mengajarkan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan *syekh* (guru besar) pengajarnya didatangkan dari Turki, Arab, Persia, India dan negeri-negeri muslim lainnya. *Kedua, Masjid Baiturrahim*, yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam sekitar tahun 1016 H / 1607 M. Masjid Baiturrahim merupakan lembaga pendidikan di kompleks istana Sultan (*Dalam*) *Darr al-Dunya*, yang khusus mengajarkan ilmu politik dan tatanegara. Selain itu di dalam istana juga terdapat Balai Setia Hukama, Balai Setia Ulama dan Balai Jama'ah Himpunan Ulama. *Ketiga, Masjid Baitul Musyabadah*, yang dibangun oleh Sultan Mughayat Syah Iskandar Tsani di kompleks *Dalam* Kuta Alam sekitar 1046 H / 1637 M sebagai pengganti Masjid Baiturrahim yang juga menjadi pusat pendidikan ilmu politik dan tatanegara di istana (Hasjmy, 1983).

Di zaman keemasan kerajaan Aceh Darussalam tepatnya pada masa pemerintahan sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami puncak perkembangan ilmu pengetahuan. Iskandar Muda dikenal sebagai seorang pemimpin yang mempunyai perhatian yang tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga di masa pemerintahannya banyak dayah (pesantren) yang didirikan. Adapun tingkatan pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu; *Pertama, Meunasah*, terdapat di seluruh *gampong* (desa) yang berfungsi sebagai sekolah dasar orang Aceh. Di *Madrasah* murid diajarkan menulis/membaca huruf Arab, ilmu agama dalam bahasa Arab-Jawi, dan ilmu Akhlak. *Kedua, Rangkang*, terdapat di tiap *mukim* yang berfungsi sebagai sekolah menengah pertama (*tsanawiyah*) orang Aceh. Di *Rangkang* murid mulai diajarkan Bahasa Arab, sebahagian kitab-kitab agama Islam berbahasa Arab-Jawi, juga sedikit ilmu-ilmu umum, ilmu bumi, *tarikh* (sejarah) Islam dan berhitung. *Ketiga, Dayah*, biasanya terdapat di tiap-tiap wilayah *Uleebalang* (hulubalang), yang berfungsi sebagai sekolah menengah atas (*alياهو*). Di *Dayah* semua pelajaran diajarkan dengan menggunakan Bahasa Arab, antara lain Fiqh (hukum), Bahasa Arab (ilmu alat), Tauhid, Tasawuf/Akhlak, ilmu Bumi, ilmu Sejarah, Tatanegara, *Faraidh*, dan ilmu Pasti. *Keempat, Dayah Teungku Chik*, yaitu lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi. Diantara ilmu yang diajarkan pada *Dayah Teungku Chik* antara lain, Fiqh, Tafsir, Hadits, Tauhid/Filsafat, Tasawuf/Akhlak, ilmu Bumi, Sejarah, Tatanegara, ilmu Bahasa dan Santra Arab, Mantiq dan ilmu Falak (astronomi) (Hasjmy, 1983).

Diantara *Dayah Teungku Chik* yang paling masyhur adalah *Jamiah Masjid Baiturrahman* di Bandar Aceh. Bahkan lembaga ini setara dengan universitas atau perguruan tinggi modern saat ini. Dibangun pada masa Sultan Alaidin Mahmud Syah I pada tahun 691 H / 1292 M, disempurnakan pembangunannya hingga mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda. *Jamiah Masjid Baiturrahman* mempunyai beberapa *daar* (fakultas), yaitu: (1) *Daar at-Tafsir wa al-Hadits* (Fakultas Ilmu Tafsir dan Hadits); (2) *Daar at-Thib* Fakultas Kedokteran); (3) *Daar al-Kimia* (Fakultas Ilmu Kimia); (4) *Daar at-Tarikh* (Fakultas Ilmu Sejarah); (5) *Daar al-Hisab* (Fakultas Ilmu Pasti); (6) *Daar al-Siyasah* (Fakultas Ilmu Politik); (7) *Daar al-'Aqli* (Fakultas Ilmu Akal/ Ilmu Alam); (8) *Daar al-Zira'ah* (Fakultas Pertanian); (9) *Daar al-Ahkam* (Fakultas Hukum); (10) *Daar al-Falsafah* (Fakultas Filsafat); (11) *Daar al-Kalam* (Fakultas Ilmu Kalam/Tauhid); (12) *Daar al-Wizarah* (Fakultas Ilmu Pemerintahan); (13) *Daar al-Khasanah Baitul Mal* (Fakultas Ilmu Perbendaharaan/ Keuangan Negara); (14) *Daar al-Ardli* (Fakultas Ilmu Pertambangan); (15) *Daar an-Nahwu* (Fakultas Ilmu Nahwu); (16) *Daar al-Mazahib* (Fakultas Ilmu Perbandingan Agama); dan (17) *Daar al-Harb* (Fakultas Ilmu Peperangan) (Darussalam, 1969). Menariknya, tidak hanya terfokus pada pendidikan tingkat tinggi, tetapi *Jamiah Masjid Baiturrahman* Bandar Aceh juga mempunyai lembaga pendidikan tingkat rendah, mulai dari *meunasah*, *rangkang* hingga *dayah*, dan menurut hemat peneliti agaknya model pendidikan *Jamiah Masjid Baiturrahman* diadopsi dari *Jamiah al-Azhar* di Mesir.

Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi akademik Islam di Aceh pernah mencapai puncak kejayaannya khususnya pada saat Sultan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Aceh Darussalam dengan Bandar Aceh sebagai ibukota negara. Di zaman keemasan Kerajaan Aceh Darussalam, Aceh telah tidak lagi mengenal buta huruf (Arab-Jawi). Bahkan hampir tidak ada orang Aceh yang tidak dapat membaca. Fakta ini sebagaimana pengakuan Agustien de Beaulieu, seorang berkebangsaan Perancis yang pernah berkunjung ke Aceh di Abad XVII (Said, 1981). Akan tetapi, bukan berarti sejarah Islam di Aceh tidak dihiasi dengan perdebatan, pertikaian dan konflik agama. Sejarah mencatat bahwa di Aceh pernah terjadi beberapa konflik agama yang tidak hanya menyebabkan perdebatan lintas mazhab bahkan menimbulkan korban jiwa. Adapun pembahasan tentang konflik-konflik agama yang terjadi di Aceh akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Aceh dan Konflik-konflik Agama

Perkembangan Sejarah Islam di Aceh tidak hanya dihiasi dengan kegemilangan budaya dan kejayaan ilmu, tetapi juga perdebatan pemahaman agama dan konflik lintas mazhab. Di Aceh, berbagai konflik agama terjadi yang dipicu oleh akar permasalahan yang beragam, mulai konspirasi politik, ekspansi penjajah, persaingan ekonomi, bahkan perebutan jamaah. Dan konflik-konflik ini telah terjadi di periode berbeda-beda dalam sejarah perkembangan Islam di Aceh. Menurut hemat penulis, peradaban Islam di Aceh telah melewati setidaknya 4 (empat) periode dengan kekhasan dan keunikan tersendiri. *Pertama, periode kesultanan Aceh Darussalam*, fokus pembahasan periode ini adalah Kesultanan Aceh

Darussalam. Karena diantara kerajaan Islam yang pernah berdiri di Aceh yang paling masyhur dengan perkembangan ilmu pengetahuan adalah kerajaan Aceh Darussalam dengan Bandar Aceh Darussalam sebagai ibukotanya; *Kedua, periode penjajahan kolonial Belanda*, ditandai dengan ekspansi Belanda ke Aceh pada tahun 1873 M, hingga kemudian keberadaan kolonialisme yang turut mempengaruhi peta politik dan perkembangan pendidikan di Aceh; *Ketiga, periode pasca kemerdekaan*, dimulai sejak kemerdekaan Republik Indonesia dan Aceh menjadi salah satu propinsi di Indonesia; *Keempat, periode pasca tsunami dan konflik*, dimulai pasca terjadinya tragedi gempa dan tsunami Aceh di akhir tahun 2004 dan perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki tahun 2005. Adapun konflik-konflik agama yang muncul pada periode-periode tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.

Periode Kesultanan Aceh Darussalam

Pada periode ini, konflik yang terjadi antara pengikut Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani, dua ulama Aceh yang bermazhab Syiah, dengan Nuruddin Ar-Raniry dan Abdurrauf As-Singkili, dua ulama Aceh yang bermazhab Ahlus Sunnah. Akar permasalahannya adalah pada perbedaan pandangan tentang tauhid kepada Allah swt. Fansuri dan As-Sumatrani mengusung paham *Wahdatul Wujud (wujudiyah)*, paham yang menganggap bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, sedangkan Ar-Raniry dan As-Singkili menganut paham *Wahdatul Syuhud*, paham yang menolak pendapat tentang penyatuan Allah dan makhluk-Nya, tetapi menyakini bahwa seluruh alam dan makhluk adalah bukti akan adanya wujud Allah swt yang Esa. *Wujudiyah*, adalah paham yang sulit dimengerti oleh orang-orang awam, karena membutuhkan kepada penalaran dan pengalaman sufi yang tidak mampu dilalui oleh semua orang. Karenanya, saat Fansuri dan As-Sumatrani masih hidup konflik ini tidak terlalu mencuat ke permukaan, dan paham ini masih dapat dipertahankan berjalan di atas garisnya. Akan tetapi setelah kedua ulama tersebut wafat, maka paham ini diselewengkan dan menjerus kepada kesesatan (Hasjmy, 1977). Bahkan Ar-Raniry di dalam kitabnya *Tibyan fi Ma'rifatil Adyan* dengan jelas menyebutkan:

"... maka tatkala lahirlah kaum wujudiyah yang zindik mulhid lagi sesat daripada murid Syamsuddin Sumatran yang sesat ..., maka telah berbaslah mereka itu dengan kami beberapa hari di hadapan hadlrat Sulthan yang terlebih salih pada masanya: yaitu Maulana Sulthan Iskandar Sani Alauddin Mughayat Syah..., maka telah kukarang kitab pada membatalkan kata mereka itu yang salah dan i'tikad mereka itu yang sia-sia..." (Al-Attas, 1966).

Dari kutipan tulisan Ar-Raniry tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau hanya menyalahkan pengikut As-Sumatrani, sedangkan yang dimaksud 'sesat' di dalam kalimat tersebut bukanlah As-Sumatrani tetapi pengikutnya. Fakta ini dikuatkan dengan adanya pujian Ar-Raniry tentang kealiman ilmu As-Sumatrani:

"pada ketika itulah segala orang-orang Islam banyak mati syahid. Syahdan pada masa itulah wafat Syekh Syamsuddin bin Abdullah Sumatran, pada

malam Isnin, duabelas hari bulan Rajab, pada hijrah seribu tigapuluh Sembilan tahun. Adalah Syekh Syamsuddin alim pada segala ilmu, dan ialah yang termasyhur alimnya pada ilmu tasawuf, dan beberapa kitab telah ditaklifkannya..." (Iskandar, 1966).

A. Hasjmy menyebutkan bahwa Ar-Raniry tidak mengkafirkan Fansuri dan As-Sumatrani, hanya yang ditentang paham *wahdatul wujud*. Akan tetapi, Ar-Raniry secara nyata memerangi penyelewengan dan kesesatan pengikut As-Sumatrani yang membentuk tariqat dan *Salek Buta* (Rimba, 1933), bahkan Ar-Raniry mengeluarkan fatwa bahwa tariqat mereka tersebut sesat dan kafir (Hasjmy, 1977).

Pada saat pemerintahan Sultanah Safiatuddin, kaum wujudiyah pengikut As-Sumatrani melakukan pengacauan bahkan menjurus kepada pemberontakan di istana. Mereka bersekutu dengan beberapa oknum istana untuk menggoyahkan kedudukan Sultanah Safiatuddin dengan menghembuskan isu tentang ketidakbolehan wanita menjadi pemimpin negara. Setelah meminta pertimbangan Ar-Raniry dan As-Singkily, Sultanah memutuskan untuk melarang paham wujudiyah di Kerajaan Aceh Darussalam, dan melarang untuk membaca dan menyimpan kitab-kitab Fansuri dan As-Sumatrani (Hasjmy, 1977). Kebijakan istana ini menimbulkan kemarahan kaum wujudiyah, dan mereka merencanakan untuk melakukan konspirasi pemberontakan dengan bekerjasama dengan golongan politik tertentu. Dan pada masa pemerintahan Sultanah Nakiatuddin, kaum wujudiyah berhasil membakar Bandar Aceh Darussalam, ibukota kerajaan Aceh Darussalam. Masjid Jami' Baiturrahman dan Keraton *Daar Ad-Dunya* pun terbakar hebat (Hasjmy, 1977).

Menurut hemat peneliti, apabila kita menilik kepada konflik antara pengikut Fansuri dan As-Sumatrani dengan Ar-Raniry dan As-Singkily dapat disimpulkan bahwa, (1) konflik tidak terjadi pada saat Fansuri dan As-Sumatrani masih hidup, menunjukkan kearifan dan kebijakan ilmu keduanya sehingga mampu menjaga *wahdatul wujud* berada pada garisnya; (2) konflik muncul akibat dari kedangkalan ilmu pengikut wujudiyah pasca wafatnya Fansuri dan As-Sumatrani dengan mendirikan tariqat dan *salek buta* yang sesat; (3) konflik muncul akibat dari adanya upaya pemakzulan Sultanah sebagai ratu kerajaan Aceh Darussalam; (4) konflik ini menyebabkan terjadinya persaingan lintas mazhab sehingga secara tidak langsung memicu produktifitas keilmuan, diantaranya munculnya kitab-kitab yang ditulis untuk menggugat dan menjawab gugatan berbagai permasalahan agama, khususnya tauhid dan ilmu kalam. Karya Hamzah Fansuri, diantaranya: *Asraaril Arifin fi Bayani Ilmis Suluk wat-Taubid* (kitab ilmu Tauhid dan Tareqat), *Syaraabul Asyikin* (kitab tariqat, syariat, hakikat dan makrifat), *Al-Muntahi* (kitab ilmu Tasawuf) (Djamaris & Prijanto, 1995/1996). Karya Nuruddin Ar-Raniry, diantaranya: *nubdha fi da'wa 'i-zill ma'a sahibibihi*, *Tibyan fi ma'rifa al-adyan*, *Hill al-ziil*, *Ma'a al-hayat li ahl la-mamat*, *Djawahir al-'ulum di kashf al-ma'lum* (Djamaris & Prijanto, 1995/1996), kitab-kitab tersebut sengaja ditulis oleh Ar-Raniry untuk membantah paham wujudiyah. (5) Konflik ini menunjukkan bahwa tradisi akademik Islam pada periode kesultanan Aceh bersifat *sakral-literal*, dimana

kekudusan dan kesucian teks benar-benar menjadi bagian penting bagi pola keberagaman umat.

Periode Penjajahan Kolonial Belanda

Pada periode ini konflik muncul antara ulama dan *umara* (pemimpin) Aceh dengan pemerintah Hindia Belanda. Akar permasalahan konflik ini terjadi akibat maklumat perang oleh Hindia Belanda kepada Sultan Aceh pada tanggal 26 Maret 1873, diikuti agresi militer Belanda pertama yang dipimpin oleh Mayor Jenderal J. H. R Kohler pada 10 Muharram 1290 H / 5 April 1873 H. Agresi pertama ini menyebabkan kekalahan mutlak di pihak Belanda, bahkan Kohler mati ditembak sniper pasukan Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman. Agresi Belanda kedua pada tanggal 16 Nopember 1873 yang dipimpin oleh Letnan Jenderal J. Van Swieten. Berbeda dengan sebelumnya, agresi kedua ini perencanaan Belanda lebih matang. Terbukti dengan adanya upaya spionase Belanda untuk memantau strategi perang Sultan Aceh, dan banyaknya jumlah pasukan yang diturunkan dibandingkan agresi sebelumnya. Pada agresi militer keduanya, Belanda menurunkan 60 buah kapal perang, 206 meriam, 22 mortir, 389 perwira, 7888 serdadu, 32 perwira dokter, 3565 serdadu dari orang hukuman laki-laki, 243 orang hukuman perempuan (agakny sebagai pemuas nafsu serdadu), pastor, guru agama, dan beberapa kakitangan, jumlah seluruhnya 12. 101 orang (Said, 1985). Dan setelah melalui pertempuran hebat akhirnya pada tanggal 6 Zulhijjah 1290 H / 24 Januari 1874 M, Van Swieten dan pasukannya berhasil menduduki *dalam* (istana Sultan) yang telah dikosongkan dan menguasai Bandar Aceh, ibukota kerajaan Aceh Darussalam (Said, 1985).

Jatuhnya *dalam* memaksa Sultan untuk menjalankan pemerintahannya di pengasingan. Ibukota kerajaan Aceh pun dipindahkan dari Bandar Aceh ke Lueng Bata, berikutnya Indrapuri, dan terakhir di Keumala (Said, 1985). Merespon situasi kritis ini, Imum Lueng Bata dan Teuku Lamnga mengadakan musyawarah yang diikuti kurang lebih 500 tokoh Aceh, musyawarah ini melahirkan ikrar bersama untuk mengobarkan semangat jihad menyeluruh untuk memerangi penjajah kafir Belanda. Ikrar ini merubah perjuangan orang Aceh, dari perang kerajaan menjadi perang rakyat, dan dari perang bela negara berubah menjadi perang bela agama. Ikrar ini menyebabkan ulama dan *umara* (sultan) Aceh saling bahu membahu melawan pendudukan Hindia Belanda. Ikrar ini menjadikan ulama menduduki posisi penting di dalam perang Aceh, dan diantara mereka bahkan terlibat langsung dalam mengatur strategi perang, diantaranya: *Teungku* Chik Tanoh Abee (*Teungku* Abdul Wahab), *Teungku* Chik Dayah Tjut Tiro (*Teungku* Muhammad Amin), *Teungku* Chik Di Tiro (*Teungku* Muhammad Saman) dan *Teungku* Chik Pante Kulu (*Teungku* Muhammad). Merekalah diantara para ulama Aceh yang telah mampu menggelorakan semangat jihad rakyat Aceh untuk berperang melawan Belanda hingga berpuluh-puluh tahun lamanya (Hasjmy, 1977). Turut sertanya *teungku* (ulama) dalam perang Aceh turut merubah fungsi *dayah* (pesantren) di Aceh, dari lembaga pendidikan Islam menjadi benteng pertahanan. Dan petuah dan nasehat para *teungku* baik secara verbal

maupun literal telah mampu mengobarkan semangat jihad orang Aceh untuk melawan ekspansi kolonial Belanda (Hermansyah & Nasruddin, 2013).

Teungku Chik Pante Kulu adalah tokoh kunci dari pemicu semangat jihad rakyat Aceh saat itu. Beliau mempersembahkan sebuah karya-sastra kepada *Teungku Chik Di Tiro*, Panglima Perang Sabil, karya-sastra tersebut bernama *Hikayat Prang Sabi*. Saat meletusnya perang Aceh, *Teungku Chik Pante Kulu* telah berada di negeri Mekkah untuk menuntut ilmu. Saat mendengar kabar sahabatnya *Teungku Chik Di Tiro* telah diangkat Sultan untuk memimpin perang melawan Belanda, terbakarlah semangat jihad di hati *Teungku Chik Pante Kulu* hingga ia memutuskan untuk meninggalkan Mekkah dan pulang ke Aceh. Dalam perjalanan pulang, di atas kapal antara Jeddah menuju Penang, beliau berhasil menulis *Hikayat Prang Sabi*, sebuah karya sastra untuk membangkitkan semangat jihad rakyat Aceh untuk melawan kafir Belanda. Sesampainya di Aceh, karya sastra ini diserahkan kepada *Teungku Chik Di Tiro* dalam suatu upacara khidmat di Kuta (benteng) Aneuk Galong (Hasjmy, 1977).

A. Hasjmy menyebutkan bahwa, saat di Mekkah *Teungku Chik Pante Kulu* kerap berhubungan dengan pemimpin-pemimpin Wahabi dan tokoh-tokoh Islam di dunia. Semangat gerakan Wahabi di Arab, dan gerakan pembaharuan Said Jamaluddin al-Afghani meninggalkan kesan mendalam bagi *Teungku Chik Pante Kulu*. Selain itu, beliau juga sangat senang membaca syair-syair Arab, khususnya karya penyair perang di zaman Rasulullah saw, seperti Hasan bin Tsabit, Abdullah bin Malik dan Ka'ab bin Zubair. Karya-karya mereka telah membimbing *Teungku Chik Pante Kulu* untuk menulis *Hikayat Prang Sabi* dan mengantarkannya menjadi salah seorang penyair perang masyhur dalam sejarah perang Aceh-Belanda (Hasjmy, 1977).

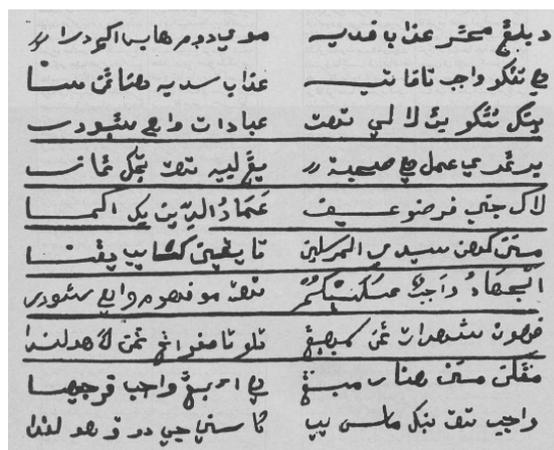
Meski demikian, beberapa sejarawan berselisih pendapat tentang pengarang karya-sastra tersebut (*Teungku Chik Di Tiro* atau *Teungku Chik Pante Kulu*), tetapi sebagian besar mereka berpendapat bahwa *Teungku Chik Pante Kulu* sebagai pengarang *Hikayat Prang Sabi* (Hasjmy, 1977). Bukti yang mendukung pernyataan ini dapat terlihat pada pujian untuk *Teungku Chik Di Tiro* pada bait *mukaddimah* di *Hikayat Prang Sabi*, karena mustahil seorang ulama semulia beliau memuji diri sendiri di dalam karyanya, dan ini menjadi bukti bahwa *Hikayat Prang Sabi* ditulis oleh *Teungku Chik Pante Kulu*. Bunyi bait tersebut adalah:

*Mengapa Agama tersia-sia,
Dunia laksana akan fana,
Ulama membisu bicara tiada,
Medan perang sunyi tiada bergema?
Manusia penaka kehilangan diri,
Jihad tiada hiraukan lagi,
Tinggal seorang berakal budi,
Teungku di Tiro teladan Nabi*
(Alfian, 1992).

Fakta sejarah menunjukkan bahwa *Hikayat Prang Sabi* menjelma menjadi puisi perang (*epic-poetry*) yang mengobarkan semangat jihad rakyat Aceh selama berpuluh-puluh tahun hingga menggentarkan pemerintah Belanda. Karya ini menjadikan pemuda-pemuda Aceh sebagai mujahid sejati yang bersedia syahid demi membela agama, sekaligus menjadikan perang Aceh sebagai neraka bagi serdadu-serdadu Belanda. Sebagaimana disebutkan oleh Zentgraaf, seorang penulis Belanda:

“...menig jong man deerstescheden op het oorsloppad onder den machtigen indruk dier lectuur op zijn emotioneele ziel ... zeer evaarlijke lectuur ... (... Para pemuda meletakkan langkah pertamanya di medan perang atas pengaruh yang sangat besar dari karya-sastra ini (*Hikayat Prang Sabi*), menyentuh perasaan mereka yang mudah tersinggung ... karya-sastra yang sangat berbahaya ...)” (Hasjmy, 1977).

Dahsyatnya pengaruh *Hikayat Prang Sabi* juga diceritakan oleh R. A. Kern, seorang penasihat urusan bumi putera Hindia Belanda di Aceh pada tahun 1921. Kern mengumpulkan sejumlah laporan pegawai administrasi Belanda, bahwa antara tahun 1910-1921 telah terjadi penyerangan dan pembunuhan terhadap pihak Belanda oleh orang-orang Aceh. Belanda menyebutnya dengan istilah *Atjeh Moorden* (Aceh gila), pembunuhan yang dilakukan secara perseorangan, dengan tidak disangka-sangka di wilayah yang telah dikuasai oleh serdadu Belanda dan dianggap steril dari pasukan Aceh. Bagi orang Aceh, pembunuhan semacam ini adalah jihad individu sebagai *tueng bila* (balas dendam) dengan cara *poh kaphe* (membunuh orang kafir). Kern menyebutkan, antara tahun 1910-1921 saja korban *Atjeh Moorden* sejumlah 99 orang (12 mati dan 87 cedera) dari 79 peristiwa penyerangan. Menurut investigasi Kern, latar belakang *Atjeh Moorden* adalah pengaruh ideologi *Hikayat Prang Sabi* sehingga menyuburkan rasa benci mendalam kepada *kaphe* (kafir) (Alfian, 1987).



Gambar 1. Cuplikan *Hikayat Prang Sabi*

(Sofyan, dkk, 1977)

Menurut hemat penulis, apabila melihat fakta seputar konflik Aceh dan kolonial Belanda dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) konflik bermula dari maklumat perang oleh Hindia Belanda kepada Sultan Aceh pada tanggal 26 Maret 1873; (2) adanya peran penting para ulama dalam mengobarkan semangat jihad pasukan Aceh untuk membela negara dan agama, diantara mereka *Teungku Chik Di Tiro* dan *Teungku Chik Pante Kulu*; (3) keikutsertaan ulama dalam pertempuran merubah alur perjuangan orang Aceh, dari perang kerajaan menjadi perang rakyat, dari perang bela negara berubah menjadi perang bela agama; (4) munculnya *Hikayat Prang Sabi*, satu diantara sastra perang yang telah mampu membakar semangat jihad orang Aceh, sekaligus menjadi bukti perkembangan tradisi akademik di Aceh periode perlawanan penjajahan Hindia Belanda; (5) dalam menulis *Hikayat Prang Sabi*, *Teungku Chik Pante Kulu* sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan gerakan Wahabi di Arab, pembaharuan Said Jamaluddin al-Afghani, dan syair-syair perang Arab yang dibacanya; (6) konflik ini menunjukkan bahwa tradisi akademik Islam pada periode penjajahan kolonial Belanda bersifat *sakral-literal*. Fakta ini dikuatkan dengan keberadaan *Hikayat Prang Sabi*, sastra perang (*epic-poetry*) penyubur patriotisme dan semangat jihad orang Aceh. Karya sastra ini sangat sakral bagi orang Aceh, tidak hanya sebatas lembaran naskah literal, tetapi juga pada kesakralan rohani para pembacanya. Karya sastra ini mampu mengkuduskan dan mensakralkan makna perang Aceh sebagai perang suci, sehingga bagi orang Aceh kematian di medan pertempuran bukan sesuatu yang menakutkan tetapi justru suatu kerinduan.

Periode Pasca Kemerdekaan

Pada periode ini, konflik agama terjadi antara kaum sakral dan kaum profan di Aceh. Kaum sakral dimaksud adalah sekelompok orang Aceh yang mempertahankan tradisi dan budaya Islam yang sakral, statis, dan eksklusif. Kelompok ini didominasi oleh kaum sarungan, *teungku* (kyai) dan santri-santri *dayah* (pesantren). Sedangkan kaum profan dimaksud adalah sekelompok orang Aceh yang menganut paham Islam kontekstual yang profan, dinamis, dan inklusif. Kelompok ini didominasi oleh para alumni *madrasah* dan sekolah umum, atau alumni *dayah* yang berpandangan progresif di Aceh. Akar permasalahan dari konflik ini tidak terlepas dari konflik yang disulut oleh Hindia Belanda dengan politik adu dombanya di periode kolonial. Dimana untuk melanggengkan kekuasaannya, Belanda memecahbelah persatuan rakyat Aceh tanpa terkecuali pemahaman keberagaman masyarakatnya.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa tokoh yang paling besar memberikan kontribusi bagi kemenangan Hindia Belanda sekaligus kekalahan rakyat Aceh adalah Christian Snouck Hurgronje (1857-1936 M), seorang sarjana orientalis dan penasihat urusan pribumi Hindia Belanda. Di dalam kata pengantar bukunya *The Achehnese* yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul *Aceh di Mata Kolonialis*, Hurgronje menyebutkan:

“Dalam bulan Juli 1891 saya berkunjung ke Aceh memenuhi instruksi Pemerintah Hindia Belanda untuk mempelajari khusus mengenai unsur keagamaan dalam

kondisi-kondisi politik di negeri itu. Ketika berada di Arab (1884-1885 M) – dan terutama di Mekkah – saya berkesempatan untuk memperoleh pengetahuan mendalam mengenai pengaruh fanatisme Islam atas sikap orang Aceh yang dengan gigih melawan kekuasaan Belanda; saya perlu berhubungan langsung dengan orang Aceh di negeri mereka sendiri selama beberapa waktu guna membulatkan pengetahuan yang telah saya peroleh dari kepustakaan dan dari pengalaman saya di kota suci Arab. ” Hurgronje, 1985).

Pengakuan Hurgronje ini secara jelas menunjukkan bahwa dirinya ditunjuk pemerintah Hindia Belanda untuk meneliti tentang penyebab sifat patriotisme fanatik orang Aceh dalam melawan penjajahan Belanda. Sebelum ke Aceh, Hurgronje terlebih dahulu singgah dan menetap Mekkah untuk mempelajari Islam secara mendalam langsung dari sumbernya. Meski demikian, penyelidikan Hurgronje tidaklah berjalan mudah, idenya tentang hubungan agama dan perang ditolak oleh beberapa pimpinan Belanda, sebagaimana pengakuannya:

“... dan sesungguhnya seluruh sikap para teungku (ulama) selama tahun-tahun terakhir dari peperangan kembali membenarkan bahwa apa yang dikemukakan dalam buku ini dalam tahun 1892 mengenai pentingnya arti faktor agama dalam peperangan; ketika itu tak seorang pun percaya, tetapi selama dua tahun terakhir ini setiap orang menerimanya sebagai suatu kebenaran yang sudah diketahuinya sejak semula. ” (Hurgronje, 1985).

Menurut penulis, agaknya telah terjadi peristiwa penting yang berhubungan dengan agama dan gejolak perlawanan orang Aceh. Peristiwa inilah yang menyebabkan munculnya rasa percaya pimpinan Hindia Belanda tentang kebenaran ucapan Hurgronje bahwa faktor agama memberi dampak kepada spirit perang orang Aceh. Dalam hal ini, penulis menduga bahwa peristiwa besar tersebut adalah beredarnya *Hikayat Prang Sabi* dalam masyarakat Aceh, hingga memicu penyerangan sporadis dan pembunuhan membabi buta terhadap *kaphe Belanda* (kafir Belanda). Peristiwa ini berikutnya dikenal dengan istilah *Arjeh Moorden* yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Dalam laporan Hurgronje dengan judul *Verslag omtrent religious-politieke toestanden in Atjeh*, yang kemudian diterbitkan dalam buku *De Atjehers*, mengupas secara tuntas tentang kehidupan orang Aceh dan kelemahan Belanda dalam menghadapi rakyat Aceh. Diantara rekomendasi Hurgronje tentang penyelesaian perang Aceh-Belanda adalah; *Pertama*, hentikan upaya mendekati Sultan, sebab Sultan hakikatnya tidak berkuasa. Walaupun Sultan bersedia berdamai belum tentu rakyat turut berdamai. Sultan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa berunding dengan *Teungku* Kadi Malikul ‘Adil, Teuku Ne’, Panglima Meusegit Raja dan Imum Lueng Bata. Pembesar empat ini pun tidak dapat berbuat apa-apa, karena bergantung kepada tiga panglima sagi. Panglima sagi pun bergantung kepada ketujuh kaum, yaitu wakil rakyat. Sedangkan rakyat bergantung kepada pendapat para ulama. Dan ulama hanya mengumumkan pendapatnya menurut hukum Allah dan Rasul. *Kedua*, jangan coba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari ulama. Sebab keyakinan merekalah yang

menyuruh mereka melawan Belanda; *Ketiga*, rebut kembali Aceh Besar; *Keempat*, untuk menarik simpati rakyat Aceh, giatkan pertanian, kerajinan dan perdagangan. Sebaliknya, Hurgronje mengusulkan untuk membentuk biro informasi untuk mengumpulkan data tentang rakyat Aceh, dan merekrut pegawai negeri dari kaum bangsawan (*uleebalang*) Aceh (Said, 1985). Rekomendasi Hurgronje ini jelas menunjukkan bahwa musuh utama Belanda di Aceh adalah para ulama dengan keyakinan Islam yang dianutnya, dan berupaya menerapkan politik *divide et impera* dengan memisahkan antara para ulama (*teungku*) dan bangsawan (*uleebalang*).

Agaknya upaya Hurgronje untuk memecahbelah *teungku* dan *uleebalang* di Aceh membuahkan hasil. Puncaknya adalah terjadinya peristiwa Perang Cumbok di Pidie pada tahun 1945-1946 M pada periode awal kemerdekaan Indonesia. Perang Cumbok terjadi antara barisan rakyat dan para ulama yang tergabung dalam organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang dipimpin oleh Hasan Aly, *Teungku* Oemar Tiro (cucu *Teungku* Chik Di Tiro) dan Abu Daud Beureueh, melawan para *uleebalang* (bangsawan) Aceh yang dipimpin oleh Teuku Daud Cumbok. Saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia digaungkan, Daud Cumbok menolak untuk mengakuinya, ia meragukan kesiapan Indonesia untuk mandiri sebagai negara merdeka. Bahkan Daud Cumbok tidak pernah menghadiri pengibaran bendera merah putih, dan melecehkan orang yang memakai lencana merah putih.

Akar permasalahan utama konflik ini karena Daud Cumbok dan para *uleebalang* merasa kedudukannya terancam sebagai wakil Belanda di Pidie. Daud Cumbok dan pengikutnya merebut senjata dari tentara Jepang yang menyerah dan memperkuat diri dengan membentuk tentara Barisan Penjaga Keamanan (BPK). Daud Cumbok dan pasukannya mulai membuat propaganda di *gampong-gampong*, menyerang dan merampok harta rakyat. Lebih jauh lagi, Daud Cumbok mulai menangkap dan menculik para ulama. Pada tanggal 16 Desember 1945, Daud Cumbok menyerang Meutareum, sebuah desa yang berjarak 7 km dari Lam Meulo, sebagai tempat pusat perjuangan rakyat dan rumah bagi sekolah agama satu-satunya di wilayah tersebut. Akhirnya, barisan rakyat melakukan perlawanan dan berkecamuklah perang Cumbok hingga menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Perang Cumbok berakhir pada awal tahun 1946, ditandai dengan menyerahnya Teuku Daud Cumbok pada tanggal 16 Januari 1946 (Arif, 1946). Perang Cumbok menjadi fakta sejarah bahwa feodalisme *uleebalang* yang terpendam dengan perang Aceh 1873 telah berhasil dimunculkan kembali oleh Belanda atas rekomendasi Hurgronje. Dan peristiwa Cumbok menjadi bukti keberhasilan Belanda dalam memecahbelah persatuan rakyat Aceh dan menciptakan jurang pemisah baru antara *teungku* dan *uleebalang* di Aceh.

Pasca kemerdekaan, gesekan lintas paham keberagamaan juga mulai terlihat terutama antara kaum sakral dan kaum profan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, kaum sakral adalah sekelompok umat Islam Aceh yang beragama secara sakral, statis, dan eksklusif. Kelompok ini didominasi oleh kaum sarungan, *teungku* (kyai) dan santri-santri *dayah* (pesantren). Diantara tokoh ulama Aceh

yang termasuk ke dalam golongan ini antara lain: Abuya Muda Waly Al-Khalidi dan Abu Hasan Krueng Kale. Sedangkan kaum profan adalah kelompok umat Islam Aceh yang menganut paham Islam kontekstual yang profan, dinamis, dan inklusif. Kelompok ini didominasi oleh para alumni *madrasah* dan sekolah umum, atau alumni *dayah* yang berpandangan progresif. Diantara tokoh ulama Aceh yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain: Abu Daud Beureueh dan Abu Hasballah Indrapuri. Pada periode pasca kemerdekaan, gesekan antara kedua kelompok ini sangat jelas terlihat. Hal ini diperuncing dengan kedudukan kaum profan yang menduduki jabatan pemerintah, sedangkan kaum sakral mulai tersisihkan dengan pendidikan *dayah* khas pesantren. Terlebih saat munculnya maklumat bersama yang dikeluarkan oleh Abu Daud Beureueh (pimpinan PUSA) dan Abu Hasballah Indrapuri (Kepala Mahkamah Syar'iyah Aceh) tentang kenduri kematian dan ziarah kubur. Sedangkan tradisi dimaksud telah dipraktikkan oleh masyarakat Aceh sejak lama terutama oleh kaum sakral.

Dari segi pendidikan, Abu Daud Beureueh melalui organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) merancang pendidikan Islam transformatif yang berupaya menjadi penengah antara pendidikan Islam konservatif di *dayah* dan pendidikan umum sekuler di sekolah-sekolah Belanda (Latif, 1992). Sedangkan Abuya Mudawali menguatkan keilmuannya dengan membangun *dayah* Darussalam di Labuhanhaji, Aceh Selatan. *Dayah* Abuya Mudawali ini mampu menciptakan jaringan pendidikan *dayah* hingga melahirkan ulama-ulama pimpinan *dayah* terkemuka di Aceh saat ini. Diantaranya, (1) *Teungku* Abdullah Hanafiah Tanoh Mirah; (2) *Teungku* Abdul Aziz MUDI MESRA Samalanga; (3) *Teungku* Adnan Mahmud Bakongan; (4) *Teungku* Prof. Muhibbuddin Waly, dan lainnya (Abubakar, 2015).

Konflik antara kaum sakral dan kaum profan yang terjadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia masih juga membekas hingga saat ini. Abu Daud Beureueh dan Abu Hasballah Indrapuri belum juga menjadi bagian dari ulama kharismatik Aceh dalam perspektif kaum sakral. Fakta ini dikuatkan dengan beredarnya poster kumpulan foto-foto ulama Aceh sejak era kesultanan Aceh hingga zaman modern dalam beberapa tahun terakhir ini. Poster tersebut dicetak dalam jumlah banyak dan dipajang di rumah-rumah dan kedai-kedai di seluruh Aceh. Uniknya, dari 124 foto ulama Aceh yang terdapat pada poster tersebut, Abu Daud Beureueh dan Abu Hasballah Indrapuri tidak termasuk di dalamnya. Isu ini sempat hangat di Aceh tentang penyebab Abu Daud Beureueh tidak termasuk di dalam poster tersebut, dan bagaimana kriteria ulama kharismatik yang dimaksud (Danil, 2015). Fakta ini diantara bukti bahwa konflik kaum sakral dan kaum profan masih saja terjadi bahkan puluhan tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Dan konflik ini terus melebar hingga kepada periode pasca tsunami dan konflik melalui isu wahabi-aswaja yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Menurut hemat penulis, apabila melihat fakta seputar konflik kaum sakral dan kaum profan pasca kemerdekaan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: (1) akar permasalahan utama konflik ini adalah adanya politik *divide et impera* Belanda di

periode kolonial; (2) Hurgronje adalah tokoh dibalik perpecahan di Aceh, rekomendasinya menjadikan ulama dan Islam sebagai pihak tertuduh atas terjadinya perang berkepanjangan di Aceh; (3) pasca kemerdekaan, ulama Aceh terpecah menjadi dua golongan, yaitu kaum sakral yang beragama secara konservatif, statis, dan eksklusif, dan kaum profan yang menganut paham Islam kontekstual yang dinamis, dan inklusif. ; (4) konflik ini menunjukkan bahwa tradisi akademik Islam pada periode pasca kemerdekaan mulai mengarah kepada *profan-kontekstual*. Fakta ini dikuatkan dengan adanya dua model pendidikan Islam berbeda, baik dari segi visi dan misi lembaga, model pembelajaran hingga kurikulum yang diajarkan. *Pertama*, lembaga pendidikan transformatif yang didirikan oleh Abu Daud Beureueh dan PUSA. Kedua, Dayah Darussalam Labuhanhaji dengan model pendidikan Islam konservatif yang didirikan oleh Abuya Muda Waly.

Periode Pasca Tsunami dan Konflik

Pada periode ini, konflik yang terjadi antara Aswaja dan Wahabi. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa Aswaja yang dimaksud golongan penganut firqah Asy'ariyah Matudiriyah dan bermazhab Syafi'iyah yang didominasi oleh golongan dayah tradisional-konservatif. Sedangkan Wahabi yang dimaksud adalah golongan pengikut pemahaman mazhab Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) dan Muhammad bin Abdul Wahab (1701-1793 M).

Musibah gempa-tsunami pada 26 Desember 2004 dan perdamaian MoU Helsinki antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 telah membawa perubahan signifikan bagi Aceh. Pembangunan infrastruktur oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), tata kota yang kian modern, hingga berdirinya lembaga pendidikan progresif menjadi fenomena baru di Aceh. Diantara lembaga pendidikan yang berdiri pasca tsunami di Aceh adalah Fatih Bilingual School (FBS) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Aceh. FBS adalah sekolah swasta yang diresmikan pada 26 Desember 2006, satu diantara sekolah Turki di Indonesia (www.fatih.sch.id, 2016). Sedangkan LIPIA Aceh merupakan cabang dari LIPIA Jakarta, perguruan tinggi Islam yang didirikan oleh Pemerintah Arab Saudi di Indonesia yang telah eksis sejak tahun 1980. Dalam aktifitasnya di Aceh, LIPIA berkerjasama dengan Masjid Raya Baiturrahman terutama untuk memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana yang minim. Dimana untuk pelaksanaan perkuliahan, LIPIA menggunakan fasilitas bangunan milik Masjid Raya Baiturrahman. Begitu pula dengan pembinaan dan pengawasan administrasi diserahkan kepada Mesjid Raya Baiturrahman, sedangkan pembinaan dan pengawasan pendidikan diserahkan pada LIPIA Jakarta (www.mpdacehbarat.or.id, 2016). Sedangkan FBS sejak awal telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat langsung dilakukan secara mandiri. FBS dan LIPIA Aceh merupakan bukti perhatian dunia terhadap musibah gempa dan tsunami Aceh, khususnya pemerintah Turki dan Arab Saudi.

Dari kedua lembaga pendidikan di atas yang terkait langsung dengan konflik agama di Aceh adalah LIPIA. Adanya isu yang berkembang bahwa LIPIA merupakan representasi gerakan Wahabi di Aceh yang terselubung dalam bentuk lembaga pendidikan. Sedangkan FBS tidak bersinggungan langsung dengan konflik agama di Aceh meski FBS berasal dari negara Turki yang berpaham sekuler. Sedangkan LIPIA yang berasal dari Arab Saudi, secara historis bersinggungan langsung dengan konflik Aceh sejak periode Daud Beureueh pada periode pasca kemerdekaan. Terlebih lagi dalam perkembangannya di Aceh, LIPIA bekerjasama dengan Masjid Raya Baiturrahman, masjid yang telah menjadi simbol peradaban Islam dan kebanggaan rakyat Aceh sejak periode kesultanan Aceh Darussalam tempo dulu. Konflik ini kian memanas dengan adanya rencana pendirian Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud oleh pemerintah Arab Saudi di Gampong Gani, Kabupaten Aceh Besar. Penandatanganan MoU dilaksanakan pada 6 September 2012 antara pihak Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud dan Dewan Pengurus Masjid Raya Baiturrahman selaku penyedia lahan (*Serambi Indonesia*, 2012). Hal ini semakin menyudutkan status pengurus Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi pihak tertuduh sebagai pendukung gerakan Wahabi di Aceh. Faktanya, Masjid Raya Baiturrahman tidak pernah menjadi lokasi majelis pengajian Wahabi tetapi pada masjid-masjid lain yang lokasinya justru berjauhan dengan Masjid Raya Baiturrahman. Kontestasi antara Aswaja dan Wahabi tidak hanya terjadi dalam kasus Masjid Raya Baiturrahman tetapi juga pada aktifitas dakwah Islam pada beberapa daerah di Aceh, seperti dakwah multimedia via radio dan televisi serta pendirian pondok-pondok pesantren.

Melihat kembali kasus-kasus yang telah penulis sebutkan pada pendahuluan tulisan ini, maka terdapat sebuah benang merah tentang penyebab terjadinya kasus Masjid Raya Baiturrahman. Bahwa adanya kekhawatiran Aswaja terhadap perkembangan mazhab Wahabi di Aceh. Sehingga menimbulkan upaya perebutan manajemen kepengurusan Masjid Raya Baiturrahman, berikutnya muncul gerakan massa berupa parade demonstrasi Aswaja ke kantor Gubernur Aceh, hingga kepada kasus pengepungan pesantren As-Sunnah di Lampeuneurut Banda Aceh. Menurut hemat penulis, harusnya kasus ini tidak perlu terjadi apabila sejak awal adanya upaya dari pemerintah Aceh untuk memfasilitasi dialog lintas mazhab Islam di Aceh. Sehingga sekecil apapun potensi konflik dapat diminimalisir sehingga tidak terjadi gerakan massa lebih jauh yang dapat berpotensi kepada anarki.

Konflik antara Aswaja dan Wahabi tidak hanya menimbulkan sisi negatif, tetapi juga menciptakan iklim positif terutama dari segi tradisi akademik dalam pendidikan Islam di Aceh. Dimana dari segi metode dan materi dakwah, Wahabi dan Aswaja memiliki perbedaan yang signifikan. Dari segi tempat dakwah, Wahabi lebih memilih masjid sebagai lokasi pengajian sehingga terkesan inklusif untuk semua kalangan, materi yang disajikan terkait aktifitas ibadah harian yang ringkas dan tuntas disampaikan dalam waktu singkat, dan media pengajian bersifat kontemporer berupa radio dan stasiun televisi. Sedangkan Aswaja dari segi tempat lebih memilih pesantren sehingga terkesan eksklusif, materi yang disampaikan memerlukan pemikiran mendalam, dan media pengajian bersifat konservatif. Akan

tetapi, pasca konflik Aswaja-Wahabi terjadinya perubahan signifikan pada metode dan media dakwah golongan Aswaja menjadi lebih progresif dan transformatif dibandingkan sebelumnya. Diantaranya, *Pertama*, digagasnya pengajian Tasawuf, Tauhid dan Fiqih (Tastafi) pada masjid-mesjid di daerah Aceh (www.hidayatullah.com, 2016). *Kedua*, munculnya pengajian multimedia oleh Lembaga *Bahtsul Masaail* (LBM) Dayah MUDI MESRA Samalanga (www.lbm.mudimesra.com, 2016). *Ketiga*, berdirinya Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah MUDI MESRA Samalanga, sebagai Perguruan Tinggi Islam berbasis pesantren pertama di Aceh (www.iaia.ac.id, 2016).

Menurut hemat penulis, apabila melihat fakta seputar konflik Aswaja dan Wahabi pasca tsunami dan konflik, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: (1) akar permasalahan utama konflik ini akibat dari tidak terselesaikannya konflik antara kaum sakral dan kaum profan pada periode pasca kemerdekaan, sehingga kian meruncing dengan isu-isu baru pasca tsunami dan konflik Aceh; (2) kiprah Pemerintah Aceh sangat dibutuhkan untuk melakukan mediasi dan resolusi konflik Aswaja-Wahabi; (3) selain segi negatif, konflik ini juga menciptakan iklim positif, khususnya pada perkembangan metode dan media dakwah Aswaja menjadi lebih progresif dan transformatif; (4) konflik ini menunjukkan bahwa tradisi akademik Islam pada periode pasca tsunami dan konflik Aceh bersifat *profan-kontekstual*. Fakta ini dikuatkan dengan munculnya metode dan media pendidikan Islam transformatif. *Pertama*, digagasnya pengajian Tasawuf, Tauhid dan Fiqih (Tastafi); *kedua*, munculnya pengajian multimedia oleh Lembaga *Bahtsul Masaail* (LBM) Dayah MUDI MESRA Samalanga; *ketiga*, berdirinya Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah MUDI MESRA Samalanga, sebagai Perguruan Tinggi Islam berbasis pesantren pertama di Aceh.

Apabila kita membandingkan keempat periode peradaban Islam di Aceh sebagaimana terlihat pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi transformasi tradisi akademik Islam di Aceh dari Sakral-Literal kepada Profan-Kontekstual. Adapun penyebab terjadinya transformasi tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

Dari Sakral-Literal ke Profan-Kontekstual

Dari 4 (empat) periode peradaban Islam Aceh yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa telah terjadi transformasi tradisi akademik Islam di Aceh dari tradisi *sakral-literal* menjadi tradisi *profan-kontekstual*. Dimana 2 (dua) periode awal bersifat *sakral-literal*, yaitu periode kesultanan Aceh Darussalam dan periode penjajahan kolonial Belanda. Sedangkan 2 (dua) periode berikutnya bersifat *profan-kontekstual*, yaitu periode pasca kemerdekaan dan periode pasca tsunami dan konflik. Adapun spesifikasi tradisi akademik Islam pada tiap periode tersebut sebagai berikut, *pertama*, periode kesultanan Aceh. Tradisi akademik Islam yang terjadi bersifat *sakral-literal*. Ini terlihat dari kesakralan dan kuatnya pengaruh kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dalam mewarnai pola keberagamaan dan kehidupan sosial rakyat Aceh pada periode tersebut. Terlihat pula bagaimana naskah kitab mampu meluruskan atau justru menyesatkan pola pikir umat.

Sehingga timbul gagasan Ar-Raniry dan As-Singkili bahwa solusi untuk membantah paham wujudiyah adalah dengan cara menulis kitab tandingan untuk meluruskan pemahaman umat dari kesesatan wujudiyah dan *salek buta*. Dengan bahasa lain, pada periode ini telah terjadi perang *literal* antara Fansuri dan As-Sumatrany dengan Ar-Raniry dan As-Singkili meski mereka sesungguhnya tidak saling bertemu di waktu dan tempat yang sama.

Kedua, periode penjajahan kolonial Belanda. Tradisi akademik Islam yang muncul pada periode ini juga bersifat *sakral-literal*. Ini terbukti dari fakta keberadaan *Hikayat Prang Sabi* karangan *Teungku Chik Pante Kulu* yang menjelma menjadi sastra perang (*epic-poetry*) penyubur sikap patriotisme dan semangat jihad orang Aceh. Pada periode ini, *Hikayat Prang Sabi* begitu sakral dan dikultuskan oleh orang Aceh. Seolah di dalam setiap untaian kata dan kalimatnya terkandung bahan bakar pemicu keberanian orang Aceh untuk menyambut kematian di medan perang. *Atjeh Moorden* adalah salah satu bukti pengaruh *Hikayat Prang Sabi* dalam perang Aceh. Bagaimana satu orang Aceh dengan gagah berani melakukan pembunuhan secara perseorangan dengan tidak disangka-sangka di wilayah yang telah dikuasai oleh serdadu Belanda dan dianggap steril dari pasukan Aceh. Secara logika Belanda mungkin perbuatan ini adalah bunuh diri karena mustahil bagi sang pembunuh untuk melarikan diri, tapi bagi orang Aceh perbuatan ini adalah jihad individu dan jalan terbaik untuk syahid di jalan Allah.

Ketiga, periode pasca kemerdekaan. Tradisi akademik yang terjadi pada periode ini terbagi menjadi dua, yaitu *sakral-literal* dan *profan-kontekstual*. Pada periode ini, para ulama di Aceh terbagi menjadi 2 (dua) golongan, *pertama, kaum sakral*, yakni sekelompok umat Islam Aceh yang beragama secara sakral, statis dan eksklusif. Tokoh yang termasuk ke dalam golongan ini adalah Abuya Muda Waly al-Khalidi dan Abu Hasan Krueng Kale. Golongan ini membudayakan tradisi akademik yang bersifat *sakral-literal*, melalui pendirian *dayah*, penulisan kitab-kitab *turats*, dan pembelajaran dengan metode *sorogan, bandongan* dan *wetonan*. *Kedua, kaum profan*, yakni sekelompok umat Islam Aceh yang menganut paham Islam kontekstual yang profan, dinamis dan inklusif. Tokoh yang termasuk dalam golongan ini adalah Abu Daud Beureueh dan Abu Hasballah Indrapuri. Golongan ini membudayakan tradisi akademik yang bersifat *profan-kontekstual*, melalui pendidikan Islam progresif yang menjadi penengah antara pendidikan Islam konservatif di *dayah* dan pendidikan umum sekuler di sekolah-sekolah Belanda. Diantara produk pendidikan progresif tersebut adalah pendirian *madrasah* binaan PUSA.

Keempat, periode pasca tsunami dan konflik. Pada periode ini gesekan konflik agama terjadi antara Aswaja dan Wahabi. Menurut penulis, kedua mazhab ini telah membudayakan tradisi akademik *profan-kontekstual*. Dalam dakwahnya, mazhab Wahabi menggunakan masjid sebagai lokasi pengajian sehingga terkesan inklusif untuk semua golongan, materi yang disajikan ringkas dan tuntas dalam waktu singkat, dan media pengajian bersifat kontemporer berupa radio dan stasiun televisi. Transformasi signifikan justru terjadi pada tradisi akademik Aswaja (kaum

sakral), sebelumnya pada periode pasca kemerdekaan bersifat *sakral-literal* berubah menjadi *profan-kontekstual* pada periode pasca tsunami dan konflik. Bila sebelumnya lebih memilih *dayah* sebagai lokasi pengajian kini mulai menggunakan masjid yang berada di luar lingkungan *dayah*, contohnya pengajian *Tastafi*. Sebelumnya hanya menggunakan metode *sorogan*, *bandongan* dan *wetonan*, kini mulai menggunakan media multimedia, seperti radio dan aplikasi android. Dan mulai mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam berbasis pesantren, seperti Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah MUDI MESRA Samalanga.

Menurut analisa penulis, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya transformasi tradisi akademik Islam di Aceh, *pertama, kedatangan bangsa asing yang melakukan intervensi terhadap dunia pendidikan di Aceh*. Secara historis, bangsa Aceh telah melakukan kontak dengan bangsa asing sejak lama, khususnya Arab dan Timur Tengah. Akan tetapi budaya belajar dan iklim intelektual antara Aceh, Arab dan Timur Tengah tidak jauh berbeda. Bahkan Jamiah Masjid Raya Baiturrahman sedikit banyak mengikuti tradisi akademik Jamiah al-Azhar Cairo, Mesir. Sedangkan ekspansi kolonial Belanda di Aceh telah merubah dunia pendidikan Aceh. Belanda memperkenalkan sekolah-sekolah umum sekuler yang sangat bertolakbelakang dengan model pendidikan *dayah* yang dikenal di Aceh. Selain itu, pasca tsunami dan konflik, Aceh dibanjiri dengan bantuan kemanusiaan di berbagai aspek diantaranya pendidikan. Dan pasca tsunami dan konflik, beberapa model pendidikan baru mulai dikenal di Aceh, diantaranya Fatih Bilingual School dan LIPIA Aceh. Oleh karena itu pada periode pasca kemerdekaan dan tsunami-konflik terjadinya perubahan tradisi akademik Islam menjadi *profan-kontekstual*. *Kedua, terjadinya perkembangan multimedia dan teknologi informasi*. Ibarat arus sungai yang deras, perkembangan multimedia dan teknologi informasi tidak terbendungkan. Inilah yang dilakukan oleh kaum sakral (Aswaja) di Aceh yang mulai menyesuaikan diri dengan penggunaan media multimedia dan teknologi dalam proses belajar mengajar. *Ketiga, tidak terselesaikannya konflik pada periode pasca kemerdekaan*. Konflik antara kaum sakral dan kaum profan pada periode pasca kemerdekaan menimbulkan pengaruh pada periode pasca tsunami-konflik. Dimana kontestasi antara kedua golongan ini bermuara pada transformasi tradisi akademik *profan-kontekstual*. Tanpa disadari, kedua golongan ini saling berkreasi untuk mengembangkan diri agar lebih unggul dalam mensyiarkan Islam dan dapat lebih diterima oleh umat.

Kontribusi Tradisi Akademik Islam terhadap Resolusi Konflik Agama di Aceh

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas beberapa fakta, bahwa peradaban Islam di Aceh selalu saja dihiasi dengan konflik-konflik agama yang seolah tiada kunjung usai. Konflik lintas mazhab Islam, konflik ulama-umara dengan penjajah Belanda serta konflik *teungku -uleebalang* telah turut merubah wajah dunia akademik Islam di Aceh. Akan tetapi, sebaliknya eksistensi tradisi akademik Islam di Aceh pada lintasan periode berbeda telah memberi kontribusi besar bagi resolusi dan rekonsiliasi konflik-konflik agama di Aceh. Spirit menuntut ilmu orang Aceh (*jak meudagang*) dan semangat mencari berkah ilmu (*mita bereukat guree*) telah

turut memberi andil bagi terjaganya perdamaian di Aceh. Berikut beberapa fakta kontribusi tradisi akademik Islam di Aceh.

Pertama, periode kesultanan Aceh. Tradisi menulis ilmiah para ulama Aceh (Ar-Raniry dan As-Singkily) telah mampu meredam konflik sosial dan agama oleh pengikut *salek buta* dan paham wujudiyah As-Sumatrani. Agaknya Ar-Raniry memahami bahwa sebuah ideologi tidak mungkin dapat dipatahkan hanya dengan kekerasan fisik dengan menangkap atau bahkan ‘menghilangkan’ pengikut. Tetapi juga dibutuhkan kepada naskah tekstual yang ilmiah agar dapat dibaca oleh para penuntut ilmu, sehingga *salek buta* dan wujudiyah akan tertolak dengan sendirinya tanpa membutuhkan bentrok fisik dan korban jiwa. Bahkan fatwa-fatwa dan kitab-kitab karangan para ulama Aceh pada periode ini telah mampu meredam pemberontakan terhadap kedudukan Sultanah hingga ke akarnya. Hal ini terkait dengan isu tentang status pemimpin perempuan di dalam Islam yang digugat oleh pengikut As-Sumatrani dan beberapa oknum *uleebalang* di Kesultanan Aceh Darussalam. Dan kitab-kitab Ar-Raniry dan As-Singkily telah menjadi fakta sejarah bahwa tradisi akademik Islam telah memberikan kontribusi bagi perdamaian di periode kesultanan Aceh Darussalam.

Kedua, periode penjajahan kolonial Belanda. Resolusi konflik Aceh pada periode ini sedikit berbeda dengan periode yang lain. Karena sangat sulit untuk mendamaikan konflik yang terjadi antara penjajah dan pribumi. Karena penjajah selalu saja mencari cara untuk melakukan ekspansi dan eksplorasi terhadap koloni jajahannya, meski harus mengobarkan harta bahkan jiwa penduduk pribumi, dan inilah yang terjadi di Aceh. Menurut penulis, satu-satunya penyelesaian konflik periode ini adalah dengan melakukan perlawanan massal dan mengobarkan semangat jihad orang Aceh terhadap penjajahan Belanda. Maka dalam hal ini, *Hikayat Prang Sabi* dengan apik telah mengambil peran tersebut. Sebagai sastra perang (*epic-poetry*), karya ini telah mampu merubah arah perang Aceh. Dari perang kerajaan menjadi perang rakyat, dari perang bela negara menjadi perang bela agama. Meski Sultan telah ditangkap, wilayah-wilayah Aceh berhasil ditaklukkan, administrasi dan pemerintahan di bawah kendali Belanda, tetapi satu kalipun Aceh tidak pernah menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Dan spirit *Hikayat Prang Sabi* terus hidup di dalam jiwa orang Aceh meski zaman telah berganti dan penulis karya-sastra tersebut telah tiada. *Hikayat Prang Sabi* menjadi bukti sejarah bahwa tradisi akademik Islam telah memberikan kontribusi bagi menjaga keberlangsungan iman dan kedamaian hati orang Aceh meski hidup dalam belenggu penjajahan Belanda.

Ketiga, periode pasca kemerdekaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada periode ini ulama Aceh terbagi menjadi 2 (dua) golongan, kaum sakral dan kaum profan. Terlibatnya kaum profan pada pemerintahan pasca kemerdekaan menjadikan kaum sakral mengasingkan diri melalui model pendidikan *dayah* yang inklusif, sehingga benturan konflik keduanya dapat diminimalisir. Salah satu *dayah* yang menjadi induk jaringan ulama Aceh adalah *Dayah* Darussalam Labuhanhaji, Aceh Selatan. Dan tradisi akademik kaum sakral yang inklusif telah menciptakan

jaringan *teungku -teungku* kharismatik di Aceh, pimpinan-pimpinan *dayah* besar dengan jumlah ribuan santri, diantaranya *Teungku* Abdullah Hanafiah Tanoh Mirah, *Teungku* Abdul Aziz Samalanga, *Teungku* Adnan Mahmud Bakongan, *Teungku* Prof. Muhibbuddin Waly, dan lainnya. Sedangkan kaum profan mengembangkan model pendidikan *madrasah* yang progresif, sebagai penengah antara pendidikan *dayah* yang konservatif dan pendidikan Belanda yang sekuler. Pada periode ini antara kaum sakral dan kaum profan, keduanya lebih menfokuskan pikiran pada pengembangan lembaga pendidikan masing-masing. Sedangkan riak-riak konflik yang terjadi hanya pada level bawah, sedangkan secara institusi tidak terjadi konflik frontal apalagi hingga bentrokan fisik. Keberadaan *dayah* dan *madrasah* pada periode ini menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan dunia intelektual Aceh dan keberadaannya telah mampu meredam potensi-potensi konflik agama yang mungkin terjadi.

Keempat, periode pasca tsunami dan konflik. Pada periode ini, konflik yang terjadi antara Aswaja (kaum sakral) dan Wahabi (kaum profan). Menurut hemat penulis, kontestasi antara kedua mazhab Islam ini tanpa disadari telah menimbulkan persaingan signifikan meski dengan lahan dakwah yang berbeda. Dimana lahan dakwah Aswaja lebih terfokus kepada masyarakat pedesaan sedangkan lahan dakwah Wahabi lebih terfokus kepada masyarakat perkotaan. Bahkan beberapa tahun terakhir ini, Aswaja telah mulai melebarkan lahan dakwahnya kepada masyarakat perkotaan. Asumsi penulis hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran Aswaja terhadap perkembangan dakwah Wahabi di perkotaan beberapa tahun terakhir. Tentu dakwah perkotaan akan berbeda dengan dakwah pedesaan, sehingga Aswaja perlu menyesuaikan diri dengan model syiar Islam ala perkotaan sebagaimana yang telah dipraktikkan Wahabi sejak lama. Berdirinya kampus berbasis *dayah*, dakwah multimedia, pengajian *live streaming*, dakwah via android, diantara model pendidikan dan media dakwah baru yang dikembangkan Aswaja pada periode ini. Kontestasi ini menyebabkan semakin menyempitnya jurang potensi konflik fisik, sebaliknya semakin terbukanya paradigma akademis di kedua mazhab tersebut. Keberadaan kampus-kampus berbasis *dayah* dan media dakwah multimedia menunjukkan bahwa tradisi akademik Islam telah memberi kontribusi bagi berkurangnya potensi-potensi konflik agama di Aceh khususnya pada periode pasca tsunami dan konflik.

PENUTUP

Secara historis, Islam di Aceh telah meninggalkan peradaban keilmuan yang sangat gemilang. Di zaman keemasannya, Aceh pernah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Keberadaan Jamiah Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, dengan 17 fakultas (*daar*) telah mewarnai kehidupan sosial orang Aceh dengan tradisi akademik Islam. Selain itu, peran *meunasah* di *gampong*, *rangkang* di *mukim*, *dayah* dan *dayah teungku chik* di wilayah *ulee balang* telah menciptakan iklim intelektual di Aceh, bahkan hampir tidak ada orang Aceh yang tidak dapat membaca.

Perkembangan Sejarah Islam di Aceh tidak hanya dihiasi dengan kegemilangan budaya dan kejayaan ilmu, tetapi juga konflik-konflik agama pada empat periode peradaban Aceh dengan kekhasan dan keunikan yang berbeda-beda. *Pertama, periode kesultanan Aceh Darussalam*, konflik terjadi antara pengikut Fansuri dan As-Sumatrani dengan Ar-Raniry dan As-Singkily. Pada periode ini, tradisi akademik yang muncul bersifat *sakral-literal*. *Kedua, periode penjajahan Belanda*, konflik terjadi antara ulama-umara Aceh dengan penjajah kolonial Belanda, tradisi akademik juga bersifat *sakral-literal*. *Ketiga, periode pasca kemerdekaan*, konflik terjadi antara kaum sakral dan kaum profan. Pada periode ini, ada dua bentuk tradisi akademik yang muncul yaitu *sakral-literal* dan *profan-kontekstual*. *Keempat, periode pasca tsunami-konflik Aceh*, konflik terjadi antara Aswaja dan Wahabi, tradisi akademik yang muncul bersifat *profan-kontekstual*.

Fakta sejarah menunjukkan terjadinya tradisi akademik Islam di Aceh telah memberikan kontribusi besar bagi resolusi konflik agama di Aceh. *Pertama*, pada periode kesultanan Aceh Darussalam, tradisi akademik telah memberikan kontribusi dalam meredam pemberontakan terhadap kesultanan Islam Aceh Darussalam. *Kedua*, pada periode penjajahan Belanda memberi kontribusi dalam mensyiarkan spirit jihad dan menjaga keteguhan iman orang Aceh. *Ketiga*, pada periode pasca kemerdekaan memberi kontribusi dalam meredam potensi konflik melalui pengembangan kelembagaan *dayah* dan *madrasah*. *Keempat*, pada periode pasca tsunami-konflik memberi kontribusi dalam meredam potensi konflik melalui pengembangan kelembagaan dan media multimedia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu*, Cet. I, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1977.
- A. Hasjmy, *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, Cet. I, 1977.
- A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Cet. I, Jakarta: Penerbit Beuna, 1983.
- Abdul Hadi, "Dinamika Sistem Institusi Pendidikan di Aceh" dalam *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 2., No. 3, September 2014.
- Abdullah Arif, *Disekitar Peristiwa Pengkhianat Tjoembok*, Koetaradja: Semangat Merdeka, 1946.
- Arab Saudi Bangun Kampus Pendidikan Islam di Aceh*, *Harian Serambi Indonesia* Edisi Jumat, 7 September 2012.
- Edwar Djamaris dan Saksono Prijanto, *Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri*, Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Dirjen Kebudayaan, 1995/1996.
- Fatih Bilingual School History*, <http://fatih.sch.id/about-us/history>, diakses pada 8 Agustus 2016.

- Geografis Aceh*, <http://acehprov.go.id/profil/read/2014/01/30/11/geografis-aceh.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2016.
- Hamdiah A. Latif, *Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA): Its Contributions to Educational Reforms in Aceh*, Thesis, Montreal: Institute of Islamic Studies McGill University, 1992.
- Hermansyah dan Nasruddin, *Benteng Kesultanan Aceh: Kajian Filologi, Arkeologi dan Topografi*, Banda Aceh: Bandar Publishing dan PDIA, 2013.
- Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Ibrahim Alfian, *Sastra Perang: Sebuah Pembicaraan Mengenai Hikayat Perang Sabil*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Inilah Dasar Masjid Raya Baiturrahman diambil Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, <http://www.acehterkini.com/2015/06/inilah-dasar-mesjid-raya-baiturrahman.html>, diakses pada tanggal 15 Juli 2016.
- Innalillah! Pengurus Masjid Raya Hentikan Pengajian Tastafi Ulama Dayah*, <http://www.voaislam.com/read/indonesia/2014/12/23/34650/innalillahi-pengurus-masjid-raya-hentikan-pengajian-tastafi-ulama-dayah/#sthash.IVMVRm5W.dpbs>, diakses pada tanggal 15 Juli 2016.
- Ismail Sofyan, dkk., *Perang Kolonial Belanda di Aceh*, Cet. I., Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977.
- Lembaga Bahtsul Masail MUDI MESRA*, <http://lbm.mudimesra.com/p/lbmmudimesramobile>, diakses pada 8 Agustus 2016.
- LIPIA Buka Pendaftaran untuk Mahasiswa dari Barat Selatan Aceh*, <http://mpdacehbarat.or.id/lipia-buka-pendaftaran-untuk-mahasiswa-dari-barat-selatan-aceh>, diakses pada 8 Agustus 2016.
- Majalah Sinar Darussalam*, No. 17, Edisi September 1969, Penerbit Yayasan Pembina Darussalam, Banda Aceh.
- Marzuki Abubakar, *Pesantren di Aceh: Perubahan, Aktualisasi dan Pengembangan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid 1, Cet. 2, Medan: Penerbit Waspada, 1981.
- Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid 2, Medan: Penerbit Waspada, 1985.
- Mumtazul Fikri, *Muslim in Non Muslim School: Harmony Construction in Islam-Budhha Relation at Christian Methodist Collage in Banda Aceh*, Artikel dipresentasikan pada *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XV* di Manado, Sulawesi Tenggara pada 3-6 September 2015.
- Naquib Al-Attas, *Raniri and Wujudiyah of 17th Century Aceh*, Singapore: Malaysian Branch, Royal Asiatic Society, 1966.

- Profil Institut Agama Islam Al-Aziziyah*, <http://iaia.ac.id/id>, diakses pada 8 Agustus 2016.
- Ribuan Santri Demo Kantor Gubernur Aceh*, <http://aceh.antaranews.com/berita/26641/ribuan-santri-demo-kantor-gubernur-aceh>, diakses pada tanggal 15 Juli 2016.
- Salat Jumat di Masjid Al-Izzah Aceh Utara Ricuh*, <http://www.ajnn.net/news/shalat-jumat-di-masjid-al-izzah-aceh-utara-ricuh/index.html?1462066680000>, diakses pada tanggal 15 Juli 2016.
- Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonialis*, Jilid I., Cet. I., terj. Singarimbun, dkk, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
- T. Iskandar, *Bustanus Salatin*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966.
- Teuku Rahmad Danil Cotseurani, *Mengapa Abu Beureueh Tidak Ada di Poster Ulama Aceh?*, Rubrik *Droe Keu Droe*, Harian Serambi Indonesia Edisi Jum'at, 12 Juni 2015.
- Umat Islam Mengepung Markas Wahabi Ma'had As-Sunnah*, <http://www.muslimmedianews.com/2015/08/umat-islam-aceh-mengepung-markas-wahabi.html>, diakses pada tanggal 15 Juli 2016.
- Warga Banda Aceh Larut Antusias Ikuti Pengajian Tastafti*, <http://www.hidayatul.lah.com/berita/berita-dari-anda/read/2014/03/09/17824/warga-banda-aceh-antusias-ikurti-pengajian-tastafti.html> diakses pada 8 Agustus 2016